

Kekerasan Atas Nama Agama : Perspektif Politik

Andre Pebrian Perdana

Email : andrepebrian@malahayati.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

Diterima: 28 Juli 2021

Disetujui: 5 Agustus 2021

Dipublikasikan: 7 Agustus 2021

Abstract :

Violence is a political and sociological phenomenon. It occurs both horizontally and vertically in various dimensions and characteristics. Over the years, Indonesia has experienced various cases of violence. One of them is that religious violence often occurs and involves the interests of the state and politics, which are important factors that give rise to political expressions in the form of violence and terror. If a person has a strong enough understanding that permeates his mind and soul, it will be difficult to correct the mindset, especially if the understanding of religion is quite narrow, namely seeing religion only textually, then this has the potential for religious fanaticism. This fact is certainly very detrimental to people's lives because it will only cause endless turmoil.

Keywords: Violence, Politics, Identity

Abstrak :

Kekerasan merupakan fenomena politik dan sosiologis. Itu terjadi baik horizontal dan vertikal dalam berbagai dimensi dan karakteristik. Selama bertahun-tahun Indonesia telah mengalami berbagai kasus kekerasan. Salah satunya kekerasan agama sering terjadi dan melibatkan kepentingan negara dan politik faktor yang penting memunculkan ekspresi politik berbentuk kekerasan dan teror. Apabila seseorang telah cukup kuat pemahaman yang merasuki pemikiran dan jiwanya, maka akan sulit untuk diperbaiki pola pikir, apalagi bila pemahaman agamanya cukup sempit, yakni melihat agama hanya secara tekstual, maka hal ini berpotensi fanatisme agama. Kenyataan demikian ini tentu sangat merugikan bagi kehidupan rakyat karena hanya akan menimbulkan gejala yang tiada akhir.

Kata Kunci : Kekerasan, Politik, Identitas

Pendahuluan

Konflik yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah tantangan besar untuk tetap bertahan di tengah situasi apa pun. Sebagai bangsa yang mejemuk, Indonesia membutuhkan ujian dan tantangan besar untuk lebih kebal dalam menghadapi gejala konflik yang terjadi di berbagai daerah. Indonesia sejak lama telah mengalami rentetan konflik yang berkepanjangan melalui pergantian pemerintah yang memunculkan pandangan dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerhati internasional yang menyoroti kemampuan Indonesia dalam merawat keberagaman sebagai kekayaan yang patut dipoles dengan baik.

Terjadinya konflik di kalangan masyarakat urban memang menjadi perhatian khalayak ramai, karena berkaitan dengan keamanan dan ketenangan masyarakat dalam merajut kehidupan yang sesuai dengan harapan. Dalam kehidupan masyarakat urban terdapat banyak kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi dan disikapi dengan penuh kearifan dan kebijakan. Apalagi masyarakat urban selalu menghadapi benturan peradaban dari situasi globalisasi dan modernisasi yang menjadi hantu bagi setiap orang yang tidak mampu melawan amukan era digital saat ini.

Di tengah situasi dan era global yang tidak terbendung, masyarakat urban pasti menghadapi konflik yang mengatasnamakan etnisitas dan religiusitas sebagai bentuk ekspresi politik identitas yang semakin menguat di kalangan masyarakat Indonesia. Benturan masyarakat urban dengan situasi global yang tidak bisa dikendalikan, secara tidak langsung telah membawa suasana konflik dalam lingkungannya maupun dalam kelompok keagamaan sebagai wadah dalam mengekspresikan praktik keagamaan yang masuk dalam ruang publik.

Di sinilah nanti akan terjadi kontestasi antara masyarakat urban sebagai penikmat globalisasi dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan kesukuan atau etnisitas dalam ruang yang lebih luas, termasuk pada ruang publik dan politik. Penguatan politik identitas ini pada gilirannya akan memengaruhi cara berpikir dan penyikap terhadap situasi konflik yang muncul di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk diuraikan mengingat politik identitas dewasa ini telah menjadi trend yang mengemuka dalam dinamika keberagaman masyarakat Indonesia yang dianugerahi khazanah kebudayaan dan agama yang tak ternilai harganya. Pada saat itulah dibutuhkan lembaga-lembaga keagamaan atau aliansi-aliansi keagamaan yang bisa mengendalikan ancaman politik identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan¹

Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana persoalan kekerasan agama yang terjadi di Indonesia?; (2) Bagaimana persoalan kekerasan agama dilihat dari perspektif politik di Indonesia?

Metode Penelitian

Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif oleh Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji disebut dengan istilah kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja²

Penelitian ini terkait data-data yang dibutuhkan peneliti diambil oleh informasi orang ataupun pihak yang berhubungan langsung berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut dianalisis untuk kemudian disimpulkan.

¹Syamsul Arifin, *Syamsul Arifin, 2001. Merambah Jalan Baru dalam Beragama: Rekonstruksi Kearifan Perennial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa, Yogyakarta, Ittaqa Press, hlm. 67-68.*

²Dyah ochtorina.dkk. 2018. *Penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 35-23.*

Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu bahan yang tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Observasi

Observasi menjadi subjek yang paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi adalah suatu aktivitas dalam mengenal tingkah laku individu dan biasanya diakhiri dengan mencatat hal-hal yang penting dan merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis melalui proses pengamatan atau gejala-gejala yang terjadi pada saat itu. Observasi merupakan metode pengumpulan dan esensial dalam penelitian apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Jenis Data

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca mencatat bahan-bahan yang terkait dengan penulisan. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berbagai kepustakaan umum mengenai kasus hukum tata negara. Artikel ilmiah / jurnal, hasil karya dibidang hukum, surat-surat kabar yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia³

Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari pengamatan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti kemudian disimpulkan⁴

Hasil dan Pembahasan

Persoalan Kekerasan Agama

Beberapa ekspresi kekerasan agama sesungguhnya bukanlah fenomena tunggal yang tidak terkait dengan apapun, atau hanya bisa dijelaskan lewat fenomena tersebut. Ia terkait dengan sejumlah persoalan, yang membantu memahami dan memperjelas persoalan kekerasan agama. Oleh karena itu, menilai satu ekspresi kekerasan sebagai “kengawuran”, adalah penilaian yang terburu-buru. Bisa jadi kesimpulan dan penilaian tersebut benar adanya bagi kelompok lain, namun bagi pelaku bahwa apa yang dilakukan adalah kebaikan, atau bahkan tugas suci (in the name of God). Terdapat perbedaan cara pandang dari dua kelompok ini, yang berangkat dari standar yang juga berbeda. Kelompok penilai mengukurnya dari sisi kemanusiaan, namun kelompok pelaku menilainya sebagai tugas keagamaan. Ia sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai fenomena yang kemudian melahirkan ekspresi tertentu misalnya bombing, teror, bunuh diri, dan kerusuhan.

³ Soejono Soekanto. 2010. “*sosiologi hukum*”. Genta Publishing. Yogyakarta. hal 46-49.

⁴ Muhammad Kadafi, dkk.. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. (Medan. Perdana Publishing. 2016) hal 32-33.

Ekspresi dan perilaku kekerasan bisa jadi terkait dengan faktor-faktor internal maupun eksternal manusia, namun juga bisa karena internal dan eksternal agama. Secara internal kemanusiaan, meminjam teori Fromm, bahwa sesungguhnya kekerasan merupakan bentuk penyaluran naluri destruktif yang ada dalam diri manusia. Jika kecenderungan manusia untuk tumbuh dihalangi, energi yang terhalang itu mengalami proses perubahan dan menjadi energi yang jahat dan merusak. Dengan demikian, kondisi individual dan sosial yang menghalangi energi yang memajukan kehidupan manusia, akan menghasilkan sifat perusakan, dan bisa menjadi sumber kekerasan.

Temuan psikologi terkini menyatakan bahwa naluri dominasi dan agresivitas adalah bawaan manusia sejak lahir. Bahkan John Stuart Mill, sebagaimana disitir Fromm, menyatakan bahwa pelajaran pertama dari peradaban adalah pelajaran tentang kepatuhan. Manusia memiliki dua kecondongan, yakni hasrat untuk menggunakan kekuasaan atas orang lain; dan ketidakinginan menggunakan kekuasaan atas diri mereka sendiri¹⁶. Kuatnya hasrat dan gairah untuk mematuhi dan diatur sebenarnya sama unggulnya dengan kehendak untuk berkuasa. Tampaknya dalam konteks politik hal tersebut lebih relevan.⁵

Berlawanan dengan Fromm, Arendt menunjukkan penolakannya terhadap teori agresivitas sebagai bawaan manusia. Hasil-hasil riset dalam ilmu sosial maupun alam cenderung untuk membuat perilaku kekerasan lebih sebagai reaksi alamiah. Dalam konteks ini, dapat diterima teori agresivitas sebagai sebuah dorongan naluriah yang memainkan peran fungsional yang sama dengan naluri-naluri nutritif dan seksual dalam proses kehidupan manusia. Namun, agresivitas selalu memerlukan provokasi dan faktor eksternal untuk membangkitkannya. Kekerasan yang mengatasnamakan agama, seringkali terjadi tidak hanya karena faktor internal agama, namun justru karena

⁵ Informasi mengenai kerusakan gereja di diambil dari Theodor Kampschulte, *Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan (Internationales Katholisches Missionswerk Misio, 2001)*

faktor eksternal. Dengan stimuli eksternal, potensi internal kekerasan agama akan dengan mudah tersulut.

Kekerasan muncul sebagai fenomena sosio-politik.

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap kegagalan atau tatanan sosio-politik yang ada. Kelompok pelaku kekerasan berupaya agar ideologi mereka menjadi satu-satunya alternatif yang dapat menggantikan tatanan yang ada. Harapannya adalah dapat mengentaskan manusia dari modernitas yang membuatnya tercerabut dari nilai-nilai agama. Amarah yang diekspresikan dengan kekerasan adalah reaksi terhadap kondisi-kondisi sosial tertentu yang diketahui dapat diubah menjadi lebih baik, namun tidak dilakukan perubahan untuk itu. Oleh karena itu, muncullah ideologi “dunia ketiga”. Dalam konteks gerakan Islam “radikal”, ideologi penyatuan dunia Islam dalam naungan khilafah islamiyah, sesungguhnya juga muncul sebagai respons terhadap ideologi-ideologi modern yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hidup manusia.

Kekerasan terjadi karena kondisi internal penganut agama.

Secara internal agama, fenomena kekerasan agama bisa jadi karena merupakan respons terhadap penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Karena itu, dalam perspektif kelompok tertentu, jalan kekerasan harus dilakukan dalam rangka melakukan pemurnian kembali agama yang telah terasuki penyakit takhayul, bid'ah dan khurafat.

Perjuangan gerakan pemurnian Wahhabi yang dimotori oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab di Saudi Arabia yang berkolaborasi dengan penguasa, gerakan purifikasi yang dilakukan Shah Waliy Allah di India melawan Islam sinkretik, gerakan purifikasi dalam Perang Padri di bawah pimpinan Imam Bonjol, adalah di antara bukti bahwa kondisi internal agama bisa menjadi pemicu yang begitu kuat melahirkan kekerasan.

Kekerasan memerlukan soliditas dan militansi kelompok.

Soliditas dan militansi gerakan kekerasan sangat tinggi. Dukungan keyakinan agama yang telah menjadi ideologi menjadikan kelompok ini sering melahirkan kekerasan terhadap kelompok lain yang diklaim salah karena berbeda ideologi. Praktek kekerasan mengikat manusia bersama sebagai sebuah keseluruhan, karena setiap individu membentuk sebuah jalinan kekerasan dalam rantai besar, sebuah bagan dari organisme besar yang telah menyeruak ke permukaan⁶

Kelompok pelaku kekerasan agama, misalnya, tidak akan pernah diperhatikan kecuali mereka terlibat dalam berbagai aksi dan provokasi. Oleh karena itu, dapat dipahami ketika para pelaku pengeboman maupun teror bom mengaku bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mendapat perhatian publik bahwa eksistensi mereka harus “diakui” dan bisa menjadi oposan jika keinginan-keinginan ideologis mereka tidak dilaksanakan pihak penguasa.

Kekerasan memiliki basis sistemik dalam sejarah survivalitas agama.

Kekerasan agama dapat berbasis pada motivasi spiritual dan makna religius. Ritual pengorbanan dan persembahan anak sebagaimana yang pernah dilakukan Ibrahim di Kan’an, merupakan salah satu contohnya. Motivasi religius dalam konteks ini terlihat lebih kuat dibanding dengan kecintaan terhadap anak. Manusia yang dalam kondisi demikian akan sangat taat terhadap sistem religinya. Karenanya dia tidak bisa disebut kejam, kendati orang lain di luar penganut sistem religi tersebut menganggapnya demikian. Dengan demikian, kepercayaan dan ketaatan terhadap doktrin agamanya semakin memperkokoh dan melegitimasi kekerasan yang dilakukannya.

Perjuangan kelompok radikalisme keagamaan, misalnya, dilakukan juga karena untuk memperoleh kebebasan dari cengkraman dan hegemoni kapitalisme, modernisme dan sekulerisme. Mereka meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi alternatif yang membebaskan. Islam yang lengkap (shumul) akan mampu menjawab semua

⁶George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 25.

problem kehidupan. Sehingga dengan demikian, perjuangan melalui kekerasan tersebut ditujukan demi keberlangsungan menjaga citra islam dan kaum muslimin.

Kekerasan terkait suprerioritas diri terhadap pihak lain

Kekerasan bisa terjadi sebagai akibat terlukainya perasaan narsistik, yakni sikap mengagumi diri karena penilaian subyektif terhadap kesempurnaan, keunggulan, dan keluarbiasaannya, baik dalam konteks kebangsaan maupun keagamaan. Narsisisme bisa muncul dalam identitas individu maupun kelompok. Narsisisme kelompok ini bisa dipahami pada keyakinan gerakan kekerasan, yang dalam konteks Islam misalnya, yang mengagumi dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan sempurna, sehingga agama- agama atau ideologi lain harus dikalahkan demi terlaksananya ke-shumul-an Islam. Sikap ini bisa mengakibatkan eksklusivitas yang karenanya pihak lain tidak perlu dihargai, bahkan jika perlu diperangi dan dihancurkan⁷

Narsisisme kelompok akan berfungsi memperkuat solidaritas dan keterpaduan kelompok. Sehingga mereka akan bereaksi keras terhadap segala bentuk pelecehan, baik yang nyata maupun yang samar, yang tertuju pada kelompoknya. Ketika simbol-simbol agamanya dilecehkan, maka dengan narsisismenya sebuah kelompok akan bereaksi keras dan radikal. Fenomena penggunaan simbol keagamaan oleh sebuah grup musik Dewa yang kemudian direspons secara reaktif oleh Front Pembela Islam (FPI), membuktikan relevansi teori ini.

Kekerasan merupakan ekspresi ketaatan terhadap Tuhan.

Manusia memiliki fitrah (sifat dasar) yang menjadi esensinya. Untuk itu, ia membutuhkan kerangka orientasi fitrinya pada obyek ketaatan penuh sebagai titik

⁷Eric Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, ter. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 227.

pusat dari segala upaya dan landasan bagi semua nilai yang diyakininya. Dalam konteks ini, ketaatan bisa diarahkan pada dua pilihan, untuk kemajuan (taqwa) atau kehancuran (fujur), untuk mendapatkan cita atau sebaliknya. Kedua sindrom ini bisa berkembang karena manusia adalah makhluk yang “belum sempurna” diciptakan, bukan hanya karena otaknya yang belum berkembang, namun juga karena ketidakseimbangan yang menjadikan dirinya mengalami proses yang tak berujung dan tak berakhir.

Kekerasan yang dilakukan oleh sebuah gerakan, karena mereka meyakini ada perintah untuk melakukannya dan berkewajiban menaatinya. Ketaatan tersebut bisa kepada Tuhan, teks agama, elit agama dan bahkan doktrin agama. Oleh karena itu, dalam teologi-teologi agama, dipahami bahwa sesungguhnya relasi manusia dengan Tuhan merupakan relasi sederhana perintah dan kepatuhan. Pemahaman literal terhadap teks keagamaan juga bisa melahirkan ketaatan secara *taken for granted* untuk melakukan agresi dan kekerasan terhadap pihak lain.

Kekerasan terkait dengan persepsi tentang Tuhan dalam tradisi agama.

Tuhan dalam gambaran masing-masing agama atau pola keberagamaan mengalami “kekerasan” karena masing-masing memiliki konsepsi dan gambaran Tuhan yang berbeda-beda. Gambaran Tuhan yang sadis dan perang akan berlawanan dengan gambaran Tuhan Pengasih dan Penyayang. Hal ini bisa mengakibatkan munculnya ekspresi keberagamaan sesuai dengan bagaimana gambaran mereka tentang Tuhannya⁸

Kekerasan memerlukan legitimasi teologis

Ekspresi kekerasan agama dalam konteks ini, misalnya, dapat dilihat pada gerakan zionisme, yang oleh kelompok Yahudi ortodoks diyakini bahwa penegakan dan

⁸SudhirKakar,*TheColorsofViolenceCulturalIdentities,ReligionandConflict*(Chicago:UniversityofChicagoPress,1996),192.

perwujudan negara Israel sesungguhnya lebih dimotivasi oleh ekspresi ketaatan mereka terhadap keyakinan bahwa Israel adalah negara yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dengan demikian, mereka akan dapat merealisasikan hukum Taurat yang selama ini tidak bisa diimplementasikan dalam diaspora, di bawah rezim-rezim dan ideologi yang sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada kelompok Yahudi untuk “bernafas” dalam konteks ke-Yahudiannya. Dengan demikian, ia merupakan perang suci yang harus dikobarkan melawan semua pihak yang menentanginya. Dalam konteks ini adalah Arab Palestina yang diklaim sebagai perampas hak Yahudi. Perang suci ini menewaskan ribuan martir dari kedua belah pihak sebagai “ongkos” sosio-teologis yang terlalu mahal untuk sebuah keyakinan ideologis. Dengan demikian, identitas ke-Yahudian dibangun di atas kekerasan yang mengatasnamakan “perintah dan ketaatan terhadap Tuhan”.

Konteks Kristen Barat yang berkeyakinan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, selama kurun perang Salib di abad ke 11-12 memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan oleh Yahudi. Teologi keterpilihan ini, dalam semangat kaum Calvinis Amerika diyakini bahwa mereka sebangsa dengan Tuhan. Ekspresi kekerasan kelompok ini sering kali muncul dalam situasi kerawanan politik ketika mereka dihantui oleh ketakutan akan kehancuran diri. Ketika agama berfusi dengan aspek-aspek kehidupan lain, tidak jarang agama menjadialat legitimasi kekerasan. Untuk memicu kekerasan, identitas agama individu menjelma menjadi homogenisasi komunal. Agama akan menjadi kekuatan dalam membangkitkan identitas emosional keagamaan, dibanding dengan identitas sosial lainnya. Dalam konteks inilah, analisis Kakar bahwa agama membawa konflik antar kelompok dengan intensitas emosi yang lebih besar dan motivasi pemaksaan yang lebih mendalam dibandingkan bahasa, daerah atau olokan terhadap identitas etnis lainnya, menemukan relevansinya.

Konteks ini pula, perlu dimajukan tesis Beuken dan Kuschel yang berkesimpulan bahwa kekerasan atas nama agama bisa dilihat dari dua perspektif, yakni: pertama, pembacaan agama mengenai hubungan sosial, di mana agama merupakan legitimasi

tersendiri bagi keabsahan perilaku kekerasan, karena memiliki fungsinya sebagai ideologi; kedua, agama sebagai faktor budaya identitas. Beberapa kasus kekerasan bernuansa agama, seperti konflik Suku Hutu dan Tutsi di Rwanda; kekerasan agama di Sri Lanka, di mana Kerajaan Singhalese dengan konsep nasionalisme Budhisnya, berperan aktif dalam pentas politik; kekerasan agama di Bosnia, yang merupakan representasi perang etnis dan budaya. Konflik dan kekerasan dimaksud, adalah bukti konkret betapa agama memiliki akar dan legitimasinya terhadap keabsahan perilaku kekerasan.

Beberapa warisan kekerasan atas nama agama, bisa disimak dalam beberapa kasus sejarah keislaman maupun kekristenan. Dalam sejarah Islam misalnya, kasus al-Hallaj yang dihukum mati, Ibnu Rusyd dihukum di depan masjid Kordoba, atau dalam konteks Indonesia adalah Shaykh Siti Jenar yang dihukum pancung akibat menyalahi pola keberagamaan mainstream. Dalam sejarah Kristiani misalnya, juga bisa dilihat kasus Priscillian yang dihukum mati dan lain- lain. Kendati berbau agama, namun sebenarnya tragedi kekerasan di atas tidak murni agama, tetapi juga terdapat faktor lain seperti politik, sosial dan bahkan interpretasi teologis.

Terdapat beberapa pijakan teologis tentang “perang suci atas nama agama” (holy war), yang interpretasinya sarat dan identik dengan kekerasan. Ini karena, dalam tradisi agama-agama, fenomena ini seakan memiliki legitimasi teologis tersendiri bagi survivalitas dan keberlangsungan doktrin tersebut. Dengan demikian, terlalu sederhana untuk mengatakan bahwa kekerasan agama terjadi karena pembelokan makna teks-teks keagamaan, karena pada dasarnya tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran agama memiliki unsur kekerasan. Hal ini juga bisa dilihat pada fakta penyebaran agama-agama, yang sarat dengan kekerasan. Belum lagi doktrin-doktrin keagamaan yang potensial menjadi pemicu kekerasan. Konsep jihad yang dimaknai sebagai perang fisik, polarisasi dar al-Islam dan dar al-harb sehingga muncul identitas kawan dan lawan, konsep dakwah sebagai ideologi pengislaman dunia, maupun keyakinan akan uniformitas antara agama dan politik, adalah di antara isu-isu teologis yang seringkali memicu ekspresi kekerasan

agama. Sumbangan kelompok Islam fundamentalis dalam menghadirkan fenomena kekerasan agama juga menarik untuk ditelisik, karena meyakini bahwa Islam bukan semata-mata agama, namun juga politik (al-islam dinwa dawlah).⁹

Simbol-simbol keagamaan yang merupakan representasi masyarakat, seperti etnosentrisme agama Yahudi, agama Mormon di AS dan Sikh di India, dan lain lain demikian kental sifat komunalnya. Sehingga, melalui simbol-simbol inilah, komunalisme agama sering menjadi pemandangan dalam relasi agama-agama. Dengan semangat dan identitas komunalisme yang kuat, maka rentan memicu terjadinya kekerasan agama. Sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu atau dengan identitas tertentu, baik suku, etnis, ras maupun agama, memiliki ikatan emosional yang kuat satu dengan yang lain. Sehingga ketika identitas mereka yang diekspresikan melalui simbol-simbol tertentu merasa terusik atau dilecehkan orang lain, dengan sangat cepat semangat komunalisme ini timbul.

Pendangkalan agama dalam transformasi masyarakat tradisional ke modern yang mengakibatkan hilangnya akar-akar psikologis dan kultural juga menjadi sebab lain dari merebaknya komunalisme agama-agama. Bercampur-baurnya agama dengan politik padahal keduanya adalah entitas yang berbeda, sehingga yang terjadi adalah politisasi agama, juga merupakan faktor yang tidak kalah menariknya bagi pembacaan kekerasan agama.

Riyanto menyatakan bahwa kekerasan agama lebih disebabkan oleh sikap keagamaan yang fanatik (fanatisme), paham keagamaan yang fundamentalis (fundamentalisme) dan integralisme. Dengan demikian, eksklusivisme sering dekat dengan konflik, pertikaian, dan kekerasan. Orang beragama yang menghadirkan kekerasan, disebabkan level keagamaannya yang jargonsentrisme, memperlihatkan keimanan yang logoistis, memiliki kekuatan bahasa yang provokatif, sempit dan rigid. Sehingga penghayatan

⁹BeukendanKuschel,etal.*AgamaSebagaiSumberKekerasan?*,ter.ImanBaehaqi(Yogyakarta:PustakaPelajar,2003),x iv-xxv.

yang kurang terhadap hakikat agama (being religious) menjadi sebab merebaknya komunalisme. Hal ini karena agama merupakan entitas yang secara sosio-psikologis bertautan langsung dengan dimensi emosionalitas dan spiritualitas manusia.

Perspektif Politik Menanggapi Persoalan Agama

Pihak yang terlibat langsung dalam berbagai aktivitas kehidupan. Semua masyarakat beragama tanpa terkecuali memiliki dambaan untuk selalu hidup rukun dan damai dengan sesama demi mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dambaan hidup rukun bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi merupakan yang lumrah dan menjadi fitrah bagi manusia untuk saling mengenal dan berbagi kasih dengan sesama. Hal ini sudah menjadi bagian dari tujuan hidup manusia di dunia, yang selalu menghendaki kebaikan dan kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan. Kerukunan merupakan dambaan dari setiap agama yang ada di dunia, karena menjadi ukuran dan cerminan dari berjalannya ajaran agama yang benar dan hakiki. Di tengah berbagai konflik agama yang muncul, tuntutan untuk mengkaji kembali konsep kerukunan yang diterapkan oleh pemerintah semakin menge- muka.

Kehidupan modern, kerukunan merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditolak, apalagi ditentang oleh kelompok keagamaan tertentu yang menghendaki adanya pertentangan dan konflik antarumat beragama. Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang inklusif yang dihuni oleh banyak sekali golongan dari yan berbeda, terutama perbedaan agama di antara kelompok masyarakat. Jalinan komunikasi dan kerjasama antar-kelompok keagamaan tentu tidak bisa ditolak dan diperdebatkan karena merupakan bagian dari fitrah manusia untuk hidup bersama dalam kondisi apa pun. Realitas kehidupan kita memang menunjukkan bahwa kemajemukan merupakan sebuah realitas sejarah yan tak mungkin dicegah. Kedua, sebagai masyarakat beragama, kita tidak mungki menolak kehadiran agama-agama untuk keluar dari Indonesia. Justru kita dituntut untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan semua agama tanpa terkecuali, karena tujuan hidup manusia bukan untuk saling menyerang

atau saling menyalahkan satu sama lain, melainkan untuk berbagai kebaikan dan saling menolong dalam kondisi apa pun dengan melibatkan semua kelompok keagamaan agar bahu-membahu melaksanakan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Memang harus diakui bahwa umat beragama sedang menghadapi ujian berat untuk membuktikan bahwa agama tetap memiliki arti penting bagi kehidupan umat manusia. Pembinaan dan pemeliharaan kerukunan bukan sekadar mengacu pada kebijakan pemerintah yang selalu menggunakan pendekatan keamanan dalam menjaga kehidupan umat beragama di Indonesia.

Pendekatan keamanan bagi masyarakat di berbagai daerah dianggap tidak akan efektif dan menyelesaikan masalah konflik agama jika terus dijadikan sebagai bagian dari mekanisme dan pendekatan. Ini karena, masyarakat beragama di berbagai daerah sudah terikat oleh budaya dan kearifan lokal yang mereka miliki sejak ribuan tahun yang lalu. Jika masih menggunakan pendekatan keamanan, maka berbagai konflik yang terjadi di Indonesia tidak akan menemukan titik temu dan penyelesaian karena tidak melibatkan langsung tokoh-tokoh adat yang mampu mendinginkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau pembakaran terhadap tempat-tempat ibadah yang suci bagi umat beragama.

Kerukunan berbasis kearifan lokal merupakan sebuah paradigma yang lebih kompatibel dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ini karena masyarakat menginginkan sebuah penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya yang sudah mendarah daging dan menjadi ruh bagi kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tidak mempunyai hak untuk mengatur kehidupan masyarakat secara mendalam dan keseluruhan, karena jika tokoh masyarakat atau adat tidak dilibatkan akan terjadi gejolak di daerah sehingga bisa menimbulkan kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan konflik itu sendiri.

Di beberapa daerah di Indonesia, tradisi dan kebudayaan masing-masing berbeda, baik berkaitan dengan konsep kerukunan yang dipakai dalam menyelesaikan setiap

persoalan atau konflik yang terjadi. Intinya setiap daerah mempunyai cara dan mekanisme sendiri dalam memperkuat semangat keber- samaan dan persaudaraan tanpa mekanisme atau pendekatan keamanan sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Mekanisme penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan pendekatan keamanan atau militer yang selama ini sering dipakai oleh pemerintah dalam mengendalikan dan mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan¹⁰

Maka kerukunan merupakan modal yang sangat luar biasa yang bisa menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di berbagai daerah. Kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang selalu bersifat dinamis dan akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pemikiran masyarakat dalam menyikapi berbagai konflik yang terjadi. Peran penting pemimpin agama dan tokoh masyarakat setempat tentu sangat besar dalam menjaga iklim persaudaraan di antara semua komponen masyarakat. Pejabat pemerintahan juga tak kalah pentingnya karena menjadi pengarah dan penanggung jawab dari semua pelaksanaan atau kegiatan kemasyarakatan, baik yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Pendekatan yang bisa dipakai adalah pendekatan langsung ke masyarakat melalui komunitas atau perkumpulan yang diwadahi langsung oleh pemerintah dan tokoh agama untuk menggerakkan semangat kerukunan antarumat beragama.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama di kota Semarang, yaitu munculnya wadah atau forum paguyuban lintas agama yang siap memfasilitasi kepentingan semua kelompok agama untuk berkomunikasi secara berkelanjutan, pemerintah daerah mendukung penuh segala program atau kegiatan yang dilakukan berbagai forum atau paguyuban lintas agama, keterbukaan semua kelompok agama dan masyarakat dan pemerintah dalam

¹⁰ Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Bina Ilmu: Surabaya, 1990) hlm 11-12

memberikan penghargaan terhadap aktivitas keagamaan yang dilaksanakan setiap umat beragama, dan juga keterlibatan generasi muda maupun media massa dalam menyuarakan semangat kerukunan dan menjadi pioneer dari tercapainya hubungan yang baik antarumat beragama¹¹

Di daerah lain juga terdapat konsep kerukunan yang diterapkan untuk hubungan kebersamaan dan persadaraan di antara sesama manusia. Dalam kehidupan masyarakat Madura, terdapat konsep kerukunan yang menjadi karakter unik dari terjalinnya semangat persaudaraan di antara masyarakat Madura. Ungkapan *settong dara* dan *rampak naong* menjadi cerminan dari praktik kerukunan yang menjadi bagian dari kebersamaan hidup masyarakat. Hal ini tentu saja untuk menepis anggapan bahwa masyarakat Madura selalu berkarakter keras dan tidak menginginkan kerukunan sebagai impian bersama.

Terciptanya kerukunan di kalangan masyarakat Madura tentu saja tidak lepas dari kemampuan masyarakatnya untuk menggunakan kearifan lokal sebagai falsafah hidup. Di kalangan masyarakat Madura, kerukunan merupakan sebuah situasi di mana antar-masyarakat bisa saling menjaga dan merawat hubungan dengan baik tanpa adanya sikap saling menonjolkan satu sama lain. Tentu saja pengaruh tokoh agama atau kiai sangat besar dalam menjaga persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Madura agar tidak mudah tersinggung dan lebih menguatamakan perdamaian dibandingkan dengan tindakan kekerasan yang merugikan banyak orang. Keterlibatan kiai atau ulama dengan tokoh masyarakat setempat juga menjadi salah satu kunci penting yang menopang terpeliharanya semangat kerukunan di kalangan masyarakat Madura.

Beberapa tokoh ORMAS Islam yang tergabung dalam dalam Forum Komunikasi ORMAS Islam di Pamekasan, misalnya, menjadi tonggak penting dari terjalinnya

¹¹Maliki, Zainuddin, *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Penerbit Galang Press: Yogyakarta, 2004), hal. 171

hubungan yang baik antar-masyarakat dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Para tokoh agama tersebut telah memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan juga memberikan keteladanan bagi masing-masing masyarakat tentang indahnya hidup rukun dan harmonis bersama-sama dengan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan dan pembinaan umat agar memiliki pemahaman yang benar tentang cara beragama secara sehat dan tidak menghakimi orang lain karena berbeda pandangan atau pemikiran.

Di Indonesia, konsep kerukunan yang berbasis kearifan lokal memang sangat mungkin untuk diterapkan agar tidak selalu bergantung pada regulasi atau aturan dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, potret kerukunan yang diterapkan di kota Makasar sebagai kota yang berada di luar Jawa dan mempunyai karakter tersendiri sebagai sebuah wilayah yang sangat tegas terhadap adanya berbagai kekerasan atau konflik berbasis agama. Masyarakat Makasar sangat mementingkan dan mendahulukan nilai-nilai kearifan lokal sebagai instrumen untuk memperkuat semangat solidaritas di antara sesama. Pendekatan adat dan kearifan lokal merupakan salah strategi tersendiri yang memperkuat semangat kebersamaan masyarakat di mana pun berada. Dalam kehidupan masyarakat memang terdapat karakter yang mampu memperkuat persaudaraan dan hubungan persahabatan agar semakin erat di antaranya adalah kesamaan karakter, sistem kekerabatan, tata cara musyawarah, maupun sistem kepercayaan yang mempengaruhi langsung terhadap cara pandang dan dalam menyikapi sesuatu. Potensi kerukunan sudah terdapat dalam kearifan lokal yang mengakar kuat dalam dinamika kehidupan masyarakat sehingga ada kecenderungan untuk mempertahankan secara berkelanjutan bangunan kehidupan yang dibangun dengan semangat yang berlipat ganda¹²

¹² Baharudin, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Lentera, 2000). hal. 45

Kekerasan atas nama agama atau yang menempatkan agama sebagai pembenarannya mendapatkan respons yang bervariasi. Azyumardi Azra menggunakan perspektif politik dalam memahami persoalan ini. Menurut Azyumardi, kekerasan atas nama agama telah ada sejak era pasca kemerdekaan dengan munculnya DI/TII. Sebuah gerakan politik yang menggunakan agama sebagai justifikasinya dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Sejarah mencatat DI/ TII gagal. Akan tetapi pada masa Soeharto muncul lagi. Hanya saja, sebagian kelompok radikal di era Soeharto adalah produk rekayasa militer atau intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya dan Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII. Sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad dalam rangka mendiskreditkan Islam. Sejak jatuhnya Soeharto, kelompok ini muncul lebih visible, lebih militan, dan vokal. Hal ini semakin diperkeras oleh kehadiran media massa, khususnya media elektronik seperti TV yang banyak memberikan liputannya atas sepak-terjang kelompok sejenis.

Aksi ini bisa karena faktor agama saja dan bisa juga karena politik. Ini bisa bertitik tolak dari pemahaman keagamaan tertentu kemudian diisi oleh muatan politik. Atau sebaliknya muatan politik lebih dulu baru diberikan justifikasi agama. Mereka punya agenda politik tertentu yang dijustifikasi oleh ayat-ayat Al Quran atau Hadis atau pandangan ulama tertentu. Atau bisa jadi dua-duanya. Penggunaan agama sebagai alat justifikasi bisa disebabkan karena pemahaman keagamaannya sangat literer atau harfiah. Dengan pemahaman ini mendorong mereka melakukan tindakan politik tertentu, termasuk tindakan kekerasan.

Penggunaan kekerasan oleh kelompok ini oleh Azyumardi disebabkan karena pada awalnya kelompok ini merupakan kelompok politik. Untuk mendapatkan dukungan publik Indonesia yang mayoritas Muslim, mereka menyertakan agama. Tujuannya agar sikap politiknya, termasuk kekerasan, seolah-olah dibenarkan agama. Cara ini sebenarnya karena melihat ajaran agama secara sepotong-sepotong. Misalnya, memahami jihad itu hanya perang. Perang yang dikembangkan bersifat inskriptif

dimana tidak hanya orang non-muslim saja yang menjadi target, tetapi juga orang Islam yang berbeda pendapat. Orang Islam sendiri, akhirnya menjadi sasaran jihad versi mereka.

Romo Mudji Sutrisno memahaminya dari sudut budaya. Dari segi kebudayaan, agama berfungsi sebagai perekat damai. Ia merupakan teks yang mengajarkan hubungan damai dengan sesama dan tulus damai dengan Yang Kuasa. Geertz menempatkannya sebagai ruang pengarti makna hidup dan orientasi hidup yang bersumber pada teks suci kebenaran hingga mendasari lapis-lapis pandangan hidup lainnya seperti akal sehat, ilmu pengetahuan, dan estetika.

Krisis di tahap agama akan mengakibatkan krisis mendasar dan total. Sebab, pengarti makna hidup runtuh. Di sini saja, terjawab bahwa peran agama secara budaya menjadi perajut identitas individu maupun kolektif atau komunitas. Di situ, juga terletak salah satu jawaban mengapa usaha mati-matian untuk tidak terjadi krisis identitas, komunitas memegang agama erat-erat dengan ketotalan tafsiran dan pembahasan hukum kebenaran mutlak. Sekalipun demikian, konflik bisa tetap diatasi secara budaya. Contoh paling mencolok adalah wacana konflik peradaban dari Samuel Huntington yang membuat masing-masing peradaban yang merasa eksistensi identitasnya ditantang konflik lalu memakai jalur politik identitas untuk mempertahankan diri dan melawan.

Konflik yang terjadi pada masa Orde Lama, yakni konflik politik yang berbasis pada ideologi dan sentimen agama, ternyata menjadikan rezim Orde Baru menerapkan pengetatan atas berbagai bentuk artikulasi politik yang berbeda dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan satu pandangan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu mengisolasi kecenderungan-kecenderungan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki arogansi berbasis sentimen teritorial, etnis dan agama menjadikan ruang gerak partisipasi politik rakyat terhambat.

Agama di era rezim Orba tunduk di bawah aturan pemerintah, berbagai insitusi keagamaan yang tidak dibentuk oleh negara atau tidak mendapat restu negara dianggap sebagai pembangkangan dan ancaman bagi eksistensi pemerintah. Lebih jauh pemerintah berusaha mengorporasikan berbagai organisasi dan tokoh agama ke dalam mesin birokrasi. Politisasi agama atau penggunaan ideologisasi agama dalam aktivitas politik sangat ditekan di era itu. Dengan begitu agama kehilangan kekuatan sebagai penyeimbang dan pengontrol kebijakan negara.

Menurut W.Liddle, seperti yang dikutip oleh Eep Saefulloh Fatah, ada tiga bentuk konflik politik yang terjadi pada masa Orla dan dihindari pengulangannya pada masa Orba, yaitu konflik keagamaan (1950-1955), konflik kesukuan (1956- 1961) dan konflik kelas (1961-1966). Paradigma semacam itu tentu akan berdampak pada kebijakan yang ekstra ketat dalam mengawasi setiap gerak dan partisipasi peran agama khususnya demi maksimalisasi produktivitas negara dalam melakukan pembangunan yang tidak ingin diganggu oleh konflik dan riak kritik dari pihak mana pun¹³

Model atau karakter kehidupan bernegara semacam Orde Baru jika dilihat dari perspektif Hannah Arendt³⁰ adalah bentuk negara yang diistilahkan dengan totalitarianisme di mana seorang pemimpin yang tidak menginginkan adanya gangguan dari bawah, tidak hanya itu bahkan memonopoli kekuasaan, menentukan bagaimana masyarakat itu hidup dan mati, dan yang lebih parah sang pemimpin pun akan mengontrol apa yang dipikirkan oleh rakyat, dan siapa yang tidak takut akan dihancurkan. Lain rezim Soeharto lain pula rezim Susilo Bambang Yudhoyono, di mana era keterbukaan dan demokratisasi yang konon adalah ideologi negara yang mampu memberikan angin segar terhadap kehidupan sosial-keagamaan. Jika menelisik argumen Arendt sebagaimana yang ditangkap oleh Rikardus terkait dengan kekuasaan,

13

Giddens, Anthony, *Perdebatan Kalsik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal. 187

kekuasaan bukanlah sarana untuk mencapai tujuan lain di luar dirinya, melainkan untuk melindungi praksis (tindakan dan komunikasi) warga negara yang bebas dan sama. Fenomena dasar kekuasaan bukanlah penginstrumentalisasian keinginan atau kehendak orang lain untuk maksud- maksud tertentu, melainkan pembentukan kehendak bersama dalam bentuk komunikasi yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan.

Selama rezim SBY berkuasa dari tahun 2004 hingga 2012, muncul beberapa isu besar terkait konflik agama, baik antarumat beragama maupun interumat beragama. Konflik tersebut bisa dalam bentuk ketegangan dan kekerasan, sebut saja misalnya laporan penelitian dari Ihsan Ali Fauzi yang memetakan pola-pola konflik keagamaan di Indonesia dari tahun 1990-2008, tercatat bahwa pada masa pemerintahan SBY terjadi eskalasi ketegangan yang tinggi terkait dengan konflik agama. Konflik interumat beragama seperti konflik Ahmadiyah, Syiah, konflik pendirian rumah ibadah di berbagai wilayah Indonesia sangat mencemaskan.

Konflik agama khususnya konflik internagama justru lebih keras dan lebih kompleks daripada konflik antaragama. Ini tidak berarti bahwa konflik antar- agama tidak kompleks, untuk konteks Indonesia pada masa rezim SBY konflik interagama lebih dominan ketimbang konflik antaragama, bahkan sampai pada kondisi yang sangat memprihat

Kesimpulan

Konflik sosial yang mengatasnamakan agama merupakan sebuah relitas sosial. Konflik sosial berdasarkan agama tidak jarang diikuti dengan tindakan kekerasan. Munculnya konflik yang mengatasnamakan agama dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti, adanya klaim kebenaran, rendahnya pemahaman keagamaan, adanya doktrin-doktrin yang provokatif, dan pemahaman pluralisme yang rendah.

Konflik yang menggunakan kekerasan adalah sesuatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan memiliki pembaruan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tidak rasional dari sifat bawaannya sendiri. Kekerasan bahkan pada sebagian kalangan sudah menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat tidak sepenuhnya benar disebabkan oleh faktor keagamaan, melainkan disebabkan oleh faktor, sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik. Dilibatkannya agama oleh kalangan elit termasuk elite politik dijadikan sebagai legitimasi dan jastifikasi suatu tindakan kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

- Syamsul Arifin, 2001. Merambah Jalan Baru dalam Beragama: Rekonstruksi Kearifan Perennial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa, Yogyakarta, Ittaqa Press.
- Dyah ochtorina.dkk. 2018. Penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto. 2010. "sosiologi hukum". Genta Publishing. Yogyakarta.
- Muhammmad Kadafi, dkk.. "Metodologi Penelitian Hukum". (Medan. Perdana Publishing. 2016).
- Informasi mengenai kerusakan gereja di diambil dari Theodor Kampschulte, Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan (Internationales Katholisches Mission- swerk Misio, 2001).
- George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Terj. Alimandan. (Jakarta: CV. Rajawali, 1985).
- Eric Fromm, Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia, ter. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

- Sudhir Kakar, *The Colors of Violence Cultural Identities, Religion and Conflict* (Chicago: University of Chicago Press, 1996).
- Beuken dan Kuschel, et al. *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, ter. Iman Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Bina Ilmu: Surabaya. 1990).
- Maliki, Zainuddin, *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Penerbit Galang Press: Yogyakarta. 2004).
- Baharudin, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Lentera, 2000).
- Gidden, Anthony, *Perdebatan Kalsik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).